



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN YAYASAN**

### **SKRIPSI**



**RAFNI AULIAMUFTI**  
**07140115**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA (PK I)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG 2012**

	No. Alumni Universitas:	<b>RAFNI AULIAMUFTI</b>	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Jakarta/30 Juni 1989 (b) Nama Orang Tua: Mochamad Fauzi dan Novizar (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Perdata (I) (e) No BP: 07140115	(f) Tanggal Lulus: 11 Januari 2012 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3.56 (i) Lama Studi: 4 tahun 5 bulan (j) Alamat Orang tua: Jalan Pendidikan I No. 6 Duren Sawit, Jakarta	

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN YAYASAN

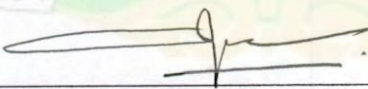

**Rafni Auliamufti. 07140115. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata). 62 halaman. Tahun 2012**

### ABSTRAK

Peranan notaris dibutuhkan dalam pendirian yayasan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dan disahkan oleh menteri agar yayasan dapat diakui keberadaannya di mata hukum. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana proses pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Yayasan dan bagaimana peranan notaris dalam pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan. Sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum dan data diperoleh melalui studi pustaka. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa, persamaan proses pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Yayasan yaitu yayasan sama-sama didirikan dengan akta pendirian yayasan yang otentik oleh notaris. Sedangkan, perbedaan proses pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Yayasan, yaitu terbagi menjadi sebagai berikut: perbedaan proses pendirian yayasan berdasarkan hukum kebiasaan dengan proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, yaitu pada hukum kebiasaan tidak ada keseragaman hukum yang dijadikan pedoman dalam pendirian yayasan, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk melakukan pendaftaran ke salah satu instansi pemerintah dan diumumkan dalam berita negara, serta status hukum yayasan tidak jelas karena tidak adanya aturan tertulis tentang yayasan yang mengatakan bahwa yayasan itu adalah badan hukum; perbedaan proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan proses pendirian yayasan berdasarkan hukum kebiasaan, yaitu dalam proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, untuk memperoleh status badan hukum yayasan harus memperoleh pengesahan dari menteri dan wajib diumumkan dalam berita negara; perbedaan proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan, yaitu permohonan pengesahan akta pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diajukan oleh pendiri atau kuasanya dan pengesahannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM setempat, atas nama menteri, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, permohonan pengesahan akta diajukan oleh notaris dan pengesahannya dilakukan secara langsung oleh menteri. Peranan notaris dalam pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan yaitu membuat akta pendirian yayasan yang otentik, setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berlaku, peranan notaris bertambah, notaris juga berperan dalam mengajukan permohonan pengesahan akta kepada menteri.

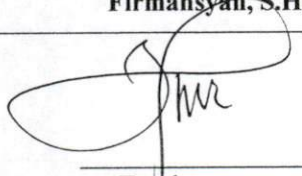
Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Januari 2012.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	<b>Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH.,C.N.,MH.</b>	<b>Firmansyah, S.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata: **Syahrial Razak, SH., MH.**

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:





University Alumnae Number:	RAFNI AULIAMUFTI	Faculty Alumnae Number:
(a) Place/Date of Birth: Jakarta/30 Juni 1989	(f) Date of graduate: 11 Januari 2012	
(b) Parent Names: Mochamad Fauzi and Novizar	(g) Predicate of graduate: Very Satisfaction	
(c) Faculty: Law	(h) IPK: 3.56	
(d) Course of Interest: Private Law (I)	(i) Term of Study: 4 years 5 months	
(e) Student Number: 07140115	(j) Parent Address: Jalan Pendidikan I No. 6 Duren Sawit, Jakarta	

## JURIDICAL REVIEW ABOUT THE ROLE OF NOTARY IN THE FOUNDATIONS ESTABLISHMENT

Rafni Auliamufti. 07,140,115. Faculty of Law, University of Andalas, Special Program I (Private Law). 62 Pages. Year 2012

### ABSTRACT

The role of notary is required in the foundation establishment. The Foundation was established by notarial document and endorsed by minister so the foundation can be recognized by the law. The problems which is lifted in this minithesis are how the process of the foundation establishment before and after the enactment of the Foundation Law and how the role of notary in the establishment of foundation before and after the enactment of the Foundation Law. This research is analytical descriptive with the juridical normative approach. Legal materials and data were obtained through a literature study. Based on qualitative analysis was known that, the similarity between the establishment foundations processes before and after the Foundation Law prevails, was known that the foundations are equally established with the foundation authentic document, made by notary, while the differences are divided into: the differences between the foundations establishment processes based on customary law with the foundations establishment processes based on Law No. 16 of 2001 on Foundations, was known that in the customary law, there was no uniformity in the law guiding the establishment of the foundation, there is no obligation for the foundation to make registration to one of the government agencies and the announced in News of the State of Republic of Indonesia, foundations and the legal status is unclear because there was no written rules about the foundation that says that the foundation was an entity law; the differences between the establishment foundations processes based on Law No. 16 of 2001 on Foundations with the foundations establishment processes based on customary law, was known that in the foundations establishment processes based on Law No. 16 of 2001 about Foundations, to obtain legal status of the foundation should obtain the ratification from the minister and should be announced in the News of the State of Republic of Indonesia; the differences between the establishment foundations processes based on Law No. 16 of 2001 about Foundations with the foundations establishment processes based on Law No. 28 of 2004, was known that the application of ratification of foundation based on Law No. 16 of 2001 was submitted by the founder and the ratification was implemented by Head of the Regional Office and Local Human Rights, on behalf of the minister, whereas the application of ratification based on the Law No. 28 of 2004, was submitted by the notary and the ratification was implemented by The Minister of Law and Human Rights. The role of notary in the establishment of foundations before and after the enactment of Law No. 16 of 2001 is making an authentic document of the foundation establishment, and when the Law No. 28 of 2004 prevails, the role of notary was added, notary also has a role in applying for approval to the minister.

This thesis has been defended in front of Examiners and has passed the Assembly on January 11, 2012  
Abstract has been approved by the examiners.

Examiners,

Signature		
Full Name	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., CN., MH	Firmansyah, S.H.

Knowing,

Chairman of Private Law: Syahrial Razak, SH., MH.

Signature

Alumnus has signed up to the Faculty/University of Andalas and got a number alumnus:

	Officer Faculty / University	
Faculty Alumnae Number:	Name:	Signature:
University Alumnae Number:	Name:	Signature:



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN YAYASAN”**. Shalawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah SAW, dengan segala perjuangan beliau telah membawa kita pada alam yang berakhlak dan berpendidikan seperti sekarang ini.

Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, ibunda Novizar dan ayahanda Mochamad Fauzi, yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, bimbingan, dan do'a yang tulus kepada penulis, sehingga dengan ini penulis akan selalu berusaha menjadi anak yang berguna dan menjadi kebanggaan keluarga. Kepada kakanda Metha Hiravia dan Salmarezka Dewi Putri dengan dukungan dan do'a kalian maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan saran dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Yoserwan, S.H.,M.H.,L.L.M selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenaddin Adegustara, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III.



2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan mengajarkan banyak ilmu kepada kami mahasiswa.
3. Bapak Syahrial Razak, S.H.,M.H. dan Ibu Misnar Syam, S.H.,M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perdata.
4. Ibu Damas Reny Priharti, S.H.,M.H. dan Ibu Neneng Oktarina, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing, menasihati, mendukung, dan memberi banyak masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H.,C.N.,M.H., dan Bapak Firmansyah, S.H. selaku Dosen Penguji I dan II.

Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang, 3 Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Yayasan .....	11
1. Pengertian Yayasan .....	11
2. Sejarah Perundang-Undangan tentang Yayasan .....	13
3. Badan Hukum Yayasan .....	15
4. Organ Yayasan .....	17
5. Kekayaan Yayasan .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	31
1. Pengertian Notaris .....	31
2. Syarat Untuk Dapat diangkat Sebagai Notaris .....	31
3. Kewenangan Notaris .....	31



4. Tugas-tugas Notaris .....	32
5. Kewajiban Notaris .....	32
6. Larangan Notaris .....	33
7. Akta Notaris .....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

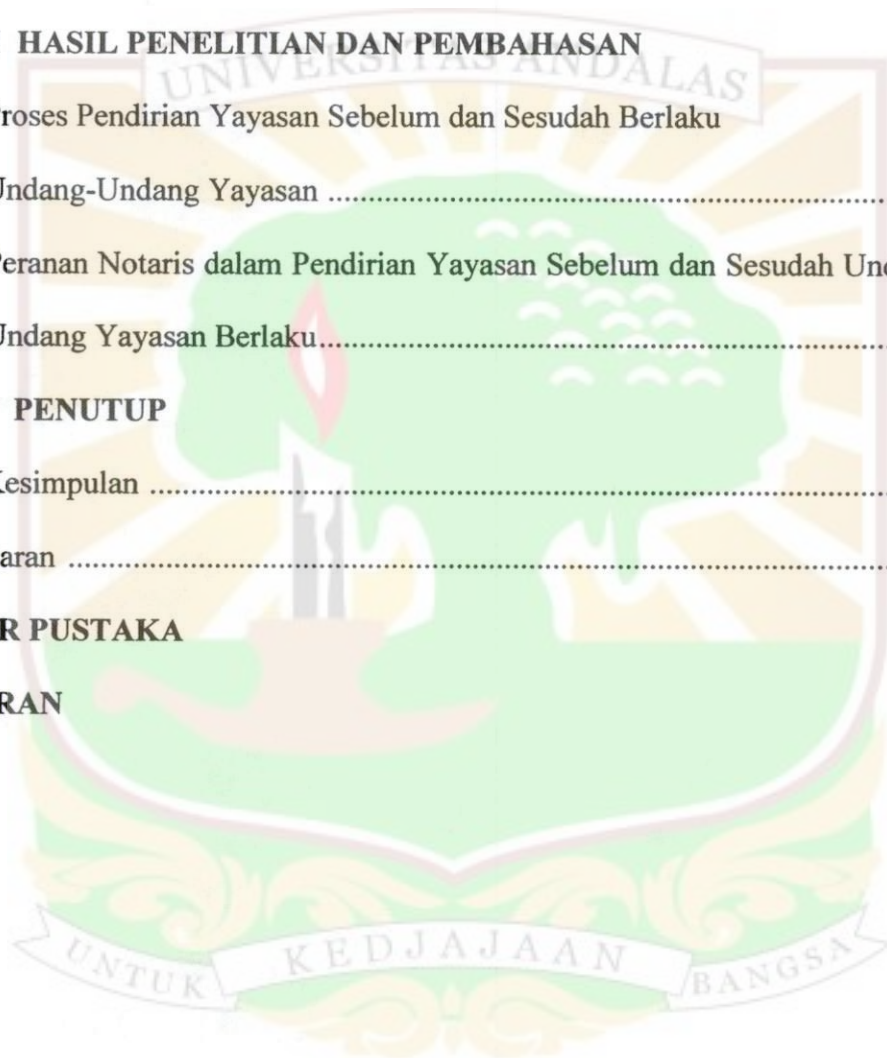
A. Proses Pendirian Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlaku	
Undang-Undang Yayasan .....	40
B. Peranan Notaris dalam Pendirian Yayasan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Yayasan Berlaku.....	54

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Yayasan yang dikenal sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebenarnya merupakan peninggalan pemerintahan Belanda yang banyak digunakan pada masa itu. Di masa penjajahan Belanda, badan ini disebut dengan nama *stichting* sedangkan di Indonesia disebut sebagai yayasan. Yayasan akan ditemui apabila terdapat pemisahan harta modal yang disediakan untuk maksud-maksud tertentu, sedangkan maksud dan tujuan dari yayasan adalah untuk suatu tujuan idiil dalam lapangan keagamaan, ilmu pengetahuan, kesosialan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya yayasan didirikan oleh individu atau suatu kelompok tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan. Setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan serta tidak mempunyai anggota”.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai yayasan:<sup>2</sup>

1. Yayasan merupakan badan hukum

---

<sup>1</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.110.

<sup>2</sup> H. Budi Untung, dkk, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 13.



Yayasan diakui sebagai badan hukum adalah yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nanti secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas, maupun pengurusnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

## 2. Yayasan mempunyai kekayaan yang dipisahkan

Dalam unsur kedua dikatakan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijabarkan secara konkret bahwa: “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

## 3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu

Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya, dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan tersebut bersifat sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan. Kegiatan tersebut dapat bersifat kumulatif (mencakup semua) atau bersifat opsional (pilihan-pilihan saja).

#### 4. Yayasan tidak mempunyai anggota

Yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Yayasan digerakkan oleh organ-organ yayasan yaitu, pembina, pengawas, dan terlebih lagi peran utama pengorganisasian yayasan berada di tangan pengurus dengan pelaksana hariannya.

Namun tidak semua yayasan yang ada dalam masyarakat itu didaftarkan untuk menjadikannya suatu badan hukum menurut peraturan yang berlaku. Di Indonesia kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Adapun alasan mereka memilih mendirikan yayasan karena jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memilih ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, pada Bab VI tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar, dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa:

---

<sup>3</sup> Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, PT.Abadi , Jakarta, 2003, hlm. 1.



“Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan”. Pegawai atau pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yaitu notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dalam membuat akta otentik, notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya dimana akta tersebut menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang otentik terhadap para pihak. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta menimbulkan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dalam penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Ikut sertanya notaris dalam pendirian yayasan ini ditujukan bukan untuk mempersulit masyarakat dalam pendirian yayasan, akan tetapi dengan ikut sertanya notaris dalam proses pendirian yayasan tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pendirian yayasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Diharapkan keikutsertaan notaris dalam pendirian

yayasan akan lebih menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pendirian yayasan di Indonesia serta membawa dampak positif bagi hubungan antar organ dalam yayasan dan juga hubungan antara yayasan dengan pihak lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunannya dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN YAYASAN”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pendirian yayasan sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
2. Bagaimanakah peranan notaris di dalam pendirian yayasan sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendirian yayasan sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.



2. Untuk mengetahui bagaimana peranan notaris di dalam pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah literatur di bidang ilmu hukum.
  - b. Untuk menambah wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi sumbangan pikiran bagi para pihak yang terkait, khususnya pihak-pihak yang akan mendirikan yayasan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### - Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan lain. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, dikumpulkan data dari buku-buku hukum berupa:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para penulis atau sarjana.
- c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa artikel-artikel hukum.

### b. Sumber Data

Sumber data berasal dari:

#### - *Library Research*

*Library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada; seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum



Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

- Studi dokumen

Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

Dalam hal ini dokumen-dokumen yang dipelajari adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Yayasan;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

#### **a. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan cara *editing*, yaitu dengan mengedit data-data mana saja yang bisa diambil sebagai hasil penelitian.

UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

b. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan uraian-uraian berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

**F. Sistematika Penulisan Hukum**

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

**BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian dan penjelasan dasar mengenai yayasan dan notaris.

**BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, seperti tata cara dan persyaratan pendirian yayasan, peranan notaris dalam pendirian yayasan, dan kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam akta yayasan.



#### **BAB IV      PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan data-data lainnya. Sedangkan saran yang dipaparkan diharapkan berguna untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam masa penelitian dan bagaimana cara yang baik guna pemecahan masalah tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Yayasan

##### 1. Pengertian Yayasan

Para sarjana hukum Belanda berpendapat bahwa *stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau perseroan terbatas, tidak mempunyai anggota atau persero, oleh karena apa yang hal *Stichting* dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain benda kekayaan.<sup>4</sup>

Paul Scholten berpendapat bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan yang tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan.<sup>5</sup>

N.H. Breigstein berpendapat bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam Yayasan itu kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiil.<sup>6</sup>

W.L.G. Lernaire mengemukakan yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi

---

<sup>4</sup> Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 86.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*



(berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.<sup>7</sup>

Meijers berpendapat bahwa pada yayasan terdapat pokok-pokok sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya.
- b. Tidak memiliki anggota.
- c. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi.
- d. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang dimaksudkan untuk itu.

Tentang hakikat yayasan, di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui karakteristik suatu yayasan, yaitu:

- a. Yayasan berbentuk badan hukum. Artinya, yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nanti secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas, maupun pengurusnya.
- b. Yayasan memiliki kekayaan tertentu. Artinya, yayasan mempunyai aset, baik bergerak maupun tidak, yang pada awalnya diperoleh dari modal/kekayaan pendiri yang telah dipisahkan.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

- c. Yayasan mempunyai tujuan tertentu. Artinya, yayasan merupakan pelaksana nilai-nilai, baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan.
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota. Artinya, yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha. Namun, yayasan digerakkan oleh organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas, dan terlebih lagi peran utama pengorganisasian yayasan berada di tangan pengurus dengan pelaksana hariannya.

## **2. Sejarah Perundang-undangan Tentang Yayasan.**

Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis tentang yayasan belum ada. Dalam KUH Perdata tidak dijumpai ketentuan mengenai yayasan. Demikian pula dalam KUHD dan peraturan-peraturan lainnya tidak ada yang mengatur mengenai yayasan.<sup>9</sup> Namun, istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUH Perdata antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680.<sup>10</sup>

Baru setelah 56 tahun Indonesia merdeka, Negara Republik Indonesia memiliki undang-undang mengenai yayasan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 4132 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Jangka waktu yang diberikan pemerintah atas sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 selama satu tahun itu

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono., *Op. cit.*, hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7.





dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturannya dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan yayasan.<sup>11</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berjalan kurang lebih tiga tahun, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005 yakni satu tahun setelah diundangkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan kepada hukum kebiasaan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>12</sup> Anwar Borahima., *Op. cit.*, hlm. 22.

diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.<sup>13</sup>

Keinginan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan pendirian dan pengoperasian yayasan tentunya didasarkan kepada pengalaman di masa lampau, banyak yayasan yang menyalahgunakan segala kemudahan yang diberikan kepada yayasan. Secara praktis, asumsi demikian memang perlu dibuktikan dengan suatu penelitian khusus. Namun secara kualitatif dapat dirasakan dan juga disaksikan berbagai yayasan yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.<sup>14</sup>

### **3. Badan Hukum Yayasan**

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berlaku, tidak ada yang mengatur tentang badan hukum yayasan, hanya dalam beberapa pasal pada KUH Perdata yang menyinggung adanya lembaga yayasan seperti Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUH Perdata. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak dibidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Yayasan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Stichting*, adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau perseroan terbatas, dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero, yayasan adalah badan hukum tanpa diperlukan campur tangan pemerintah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ahmad Rafiq., *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 491-492.



Menurut Soebekti, pengertian badan hukum yaitu suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim.<sup>15</sup>

Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan yaitu milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan. Kebiasaan yang terjadi akta notaris tersebut tidak didaftarkan atau didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri setempat. Kedudukan yayasan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan adanya ketentuan tertulis ini telah secara jelas menyatakan yayasan adalah badan hukum.

Jika kita melihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, tidak mempunyai anggota dimana yayasan mempunyai kekayaan sendiri. Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

---

<sup>15</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 18

Dalam mendapatkan status badan hukum yayasan diperlukan suatu proses yaitu diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan dilaksanakan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia maka resmilah yayasan sebagai badan hukum karena ini merupakan syarat mutlak yayasan untuk diakui sebagai badan hukum. Fungsi pengesahan ini adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada penipuan.

#### **4. Organ Yayasan**

Organ yayasan telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ yayasan tersebut masing-masing dibahas sebagai berikut:

##### **a. Pembina**

Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan. Kedudukan pembina sebagai organ tertinggi dapat dilihat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan, bahwa pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang Yayasan atau anggaran dasar. Selaku organ tertinggi pembina memiliki kewenangan untuk menilai hasil pekerjaan pengurus dan pengawas setiap tahun, hal ini tampak dalam laporan tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan pengawas, kemudian disahkan dalam Rapat Pembina. Rapat



Pembina dapat saja menolak pengesahan jika laporan tersebut isinya ternyata tidak benar.

Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Yayasan adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Dalam hal terjadinya kekosongan pembina, Pasal 28 Ayat (4) menyebutkan bahwa paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3). Dalam rapat gabungan tersebut untuk mengambil keputusan, harus memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan atau anggaran dasar. Kuorum dalam Pasal 18 Ayat (2) adalah, apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota pengurus dan anggota pengawas, sedangkan dalam Pasal 19 Ayat (2) kuorum untuk mengambil keputusan minimal  $\frac{2}{3}$  dari seluruh jumlah yang hadir dalam rapat gabungan.

Sebagai organ yayasan, pembina mempunyai kewenangan yang telah ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan, sebagai berikut:

- a. Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar,
- b. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas,

- c. Memberikan penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan,
- d. Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Rapat anggota pembina dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Undang-Undang tidak menetapkan batas waktu akhir untuk mengadakan rapat tahunan tersebut, tetapi diserahkan kepada itikad baik para anggota pembina yayasan saja. Dalam rapat tahunan tugas pembina juga telah ditetapkan oleh Pasal 30 Ayat (1), yaitu melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

Setiap anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun anggota pengawas. Larangan tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Yayasan.

b. Pengurus

Pengurus merupakan organ eksekutif dalam yayasan, karena pengurus yang melakukan pengurusan baik di dalam dan di luar yayasan. Pengurus menjalankan roda yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.

Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) menetapkan, bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat tambahan yang dapat dituangkan dalam anggaran dasar yayasan antara lain; pendidikan, pengalaman bekerja, berkelakuan baik, dan tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.



Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan, bahwa masa jabatan pengurus adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan seseorang dapat diangkat sebagai pengurus yayasan, dengan masa jabatan minimal lima tahun (satu periode), dan untuk diangkat kembali sampai berapa kali, awalnya dibatasi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, akan tetapi setelah terjadi perubahan undang-undang tersebut dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ternyata Pasal 32 Ayat (2) tidak membatasi lagi, dan diserahkan kepada ketentuan anggaran dasar yayasan.

Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah mengatur, bahwa susunan pengurus yayasan minimal harus ada tiga orang yang menduduki jabatan sebagai berikut:

- a. Seorang ketua
- b. Seorang sekretaris
- c. Seorang bendahara

Suatu yayasan apabila tergolong maju dan banyak kegiatannya, kemungkinan tidak cukup pengurusnya hanya tiga orang, maka susunan kepengurusan juga perlu dikembangkan. Pengembangan susunan pengurus tersebut dapat dituangkan dalam anggaran dasar yayasan, agar semua personil yayasan menjadi terikat.

Apabila anggota pengurus selama dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang dinilai oleh pembina merugikan yayasan, maka dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Pemberhentian

itu dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat pembina. Pembina perlu melakukan pengangkatan anggota pengurus yang baru untuk menggantikan anggota pengurus yang diberhentikan. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa pembina diwajibkan untuk memberitahukan penggantian pengurus tersebut kepada menteri dan instansi terkait, dalam tempo 30 hari sejak tanggal dilakukannya penggantian pengurus. Menteri maupun instansi terkait hanya sekedar mengetahui adanya pergantian pengurus saja, tidak perlu memberikan pengesahan atau persetujuannya.

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan, bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa organ eksekutif yang berwenang mewakili yayasan, sedangkan organ yayasan lainnya yaitu pembina dan pengawas cukup urusan ke dalam saja. Semua perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan, merupakan perbuatan yayasan.

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan, bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, atau
- b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan yayasan.



Adapun jalan keluarnya menurut Pasal 36 Ayat (2) yang berhak mewakili yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar. Ketika membuat anggaran dasar hal ini harus diatur terlebih dahulu siapa yang berwenang.

Pembatasan mengenai wewenang pengurus yayasan diatur dalam Pasal 37 Ayat (1), dengan menyatakan bahwa pengurus tidak berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang,
- b. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, atau
- c. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan lain.

Pembatasan-pembatasan kewenangan pengurus lainnya dapat dilakukan dengan mencantumkannya pada anggaran dasar yayasan.

Di samping ada pembatasan wewenang, dalam Undang-Undang Yayasan juga diatur tentang larangan yang harus dipatuhi oleh pengurus yayasan. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan/atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota pengurus yang dapat membuktikan

bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

c. Pengawas

Pengawas bertugas mengawasi pekerjaan pengurus yayasan. Dalam Pasal 40 Ayat (1) disebutkan, bahwa selain tugas tersebut, pengawas juga mempunyai tugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Jumlah pengawas yayasan yang ditetapkan dalam Pasal 40 Ayat (2) minimal satu orang. Dengan satu orang pengawas sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang, bahwa di dalam organisasi yayasan sudah terdapat lembaga pengawasan, di samping organ-organ lainnya. Akan tetapi biasanya jumlah pengawas disesuaikan dengan kebutuhan.

Persyaratan untuk diangkat menjadi pengawas yayasan tidak berbeda dengan persyaratan menjadi pengurus, yaitu orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Persyaratan itu sepertinya sebagai persyaratan pokok saja. Oleh karena itu perlu ditambah persyaratannya, dengan menuangkannya ke dalam anggaran dasar yayasan, dan hal ini diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Yayasan.

Masa jabatan pengawas sama dengan masa jabatan pengurus yaitu lima tahun. Setelah masa jabatan tersebut selesai, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1), karena dengan masa jabatan yang sama, dikehendaki tidak



ada ketimpangan waktu dalam melaksanakan tugas antara pengawas dan pengurus.

Pasal 43 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa wewenang pengawas yayasan dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), pembina wajib:
  - a. Mencabut keputusan pemberitahuan sementara; atau
  - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
- (5) Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), pemberhentian sementara batal demi hukum.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, ketentuan Pasal 42 mewajibkan supaya dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kewajiban ini juga sama dengan kewajiban pengurus dalam mengurus yayasan, karena dengan itikad baik itu diharapkan akan memperlancar pencapaian maksud dan tujuan yayasan dapat tercapai.

Apabila pengurus di dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, apalagi sampai merugikan yayasan atau pihak ketiga, kesalahan itu tidak dapat dilepaskan dari pengawas, karena pengawas juga ikut bersalah di dalam menjalankan tugasnya. Kesalahan pengurus dapat terjadi karena lemahnya pengawasan. Dengan demikian pengawas mempunyai andil dalam

kesalahan, dan hal ini sudah seharusnya mempunyai akibat yang sama dengan pengurus, yaitu pengawas juga bertanggung jawab secara pribadi.

Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) pengawas dapat memberhentikan anggota pengurus dalam waktu sementara dengan menyebutkan alasannya. Alasannya harus jelas dan dapat menunjuk peraturan mana yang dilanggar oleh anggota pengurus, misalnya melanggar ketentuan anggaran dasar.

Pengawas yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugasnya, tidak dikenal adanya pemberhentian sementara, melainkan pemberhentian yang bersifat final. Pemberhentian itu dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pembina melalui keputusan dalam suatu rapat.<sup>16</sup> Pemberhentian itu dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan tugas pengawas yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar, sehingga akan merugikan yayasan. Sebaliknya jika pemberhentian itu dilakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar, pengadilan dapat membatalkan setelah pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan. Jika ada pengawas yang diberhentikan, tentu harus dilakukan penggantian pengawas.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan itu bukan dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan, melainkan hanya untuk diketahui oleh Menteri saja.

Tanggung jawab pengawas akibat yayasan diputus kepailitan oleh pengadilan, ketentuan Pasal 47 yang berlaku bagi pengawas ternyata pada dasarnya sama dengan ketentuan Pasal 39 yang berlaku bagi pengurus. Akibat

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.107.

<sup>17</sup> *Ibid.*



kepailitan, maka setiap anggota pengawas bertanggung jawab secara renteng, jika kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian.

## **5. Kekayaan Yayasan**

Pada hakikatnya yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan untuk suatu tujuan tertentu yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Kekayaan yayasan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Yayasan adalah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi atau pendiri dan dijadikan aset yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Setelah dipisahkan, kekayaan tersebut bukan lagi milik perseorangan atau badan hukum yang dimaksud, melainkan telah menjadi milik yayasan. Pengelolaan kekayaan yayasan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pengurus, tetapi kekayaan tersebut tidak dapat dibagikan kepada pendiri, pengurus, dan/atau pengawas.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan, bahwa sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 26 Ayat (1) yang menyebutkan, kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang.

Undang-Undang Yayasan ternyata membedakan uang dengan barang. Padahal sebenarnya uang itu sendiri termasuk ke dalam jenis barang, karena dalam KUH Perdata secara garis besarnya barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Uang statusnya sebagai barang bergerak. Pengaturan yang demikian kemungkinan pembentuk undang-undang

---

<sup>18</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 112.

menginginkan ketentuan yang jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

#### **a. Sumber perolehan kekayaan yang lain**

Selain kekayaan yayasan berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber-sumber lain. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber perolehannya berasal dari: sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **1) Sumbangan yang tidak mengikat**

Yang dimaksudkan adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain asalkan bantuan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Berhubung ketentuannya tidak boleh mengikat yayasan, maka pihak mana pun yang memang berniat boleh memberikan bantuan kepada yayasan, tanpa mengikatkan diri. Sebaliknya untuk yayasan sebagai penerima bantuan, juga tidak boleh mengikatkan diri kepada pemberi bantuan. Yayasan harus siap menolak apabila ada bantuan yang mengikat padanya.<sup>21</sup>

##### **2) Wakaf**

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 67.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.68.

<sup>21</sup> *Ibid*.



jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>22</sup> Harta yang diwakafkan dapat berasal dari seseorang atau badan hukum. Yayasan akan menerima harta yang diwakafkan sebagai harta kekayaan yayasan, untuk dikelola dan digunakan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.<sup>23</sup>

### **3) Hibah**

Yang disebut hibah menurut Pasal 1666 Ayat (1) KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Syarat yang harus dipenuhi agar hibah itu sah adalah perjanjiannya dibuat dengan akta notaris, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian adanya hibah yang dibuat oleh seseorang, karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, isinya harus dipercaya kebenarannya. Seseorang maupun badan hukum mana pun dapat melakukan hibah barang yang dimilikinya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepada suatu yayasan, dan barang yang dihibahkan itu menjadi kekayaan yayasan.

### **4) Hibah wasiat**

Pasal 957 KUH Perdata menyebutkan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Jika dalam hibah seperti diketahui di atas, penyerahan barang yang dihibahkan dilakukan ketika penghibah masih hidup. Sedangkan untuk hibah wasiat, dilakukan ketika warisan telah terbuka, yaitu dengan meninggalnya pewaris atau pembuat hibah wasiat. Dalam Undang-Undang Yayasan telah diketahui bahwa salah satu sumber perolehan kekayaan yayasan adalah dari hibah wasiat. Syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan hukum waris.

#### **5) Perolehan lainnya**

Dalam Penjelasan Pasal 26 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Yayasan menyebutkan perolehan lain dimaksud, misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan.

Sebuah yayasan selaku badan hukum yang memiliki sejumlah saham pada perseroan terbatas, maka setiap tahunnya jika perseroan itu memperoleh keuntungan, sebagai pemegang saham akan memperoleh deviden. Deviden yang diterima itu merupakan pemasukan yayasan sebagai kekayaan yayasan. Demikian pula jika kekayaan yayasan yang berupa uang disimpan pada bank sebagai tabungan, tiap bulannya akan mendapat bunga sekian persen.<sup>24</sup> Kemudian kekayaan yayasan berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, jika harta ini tidak digunakan dan disewakan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 73



kepada pihak lain, biaya sewanya merupakan pemasukan bagi yayasan.<sup>25</sup>

Sedangkan perolehan dari hasil usaha yayasan, misalnya yayasan mendirikan badan usaha seperti toko buku, percetakan, bordir pakaian, jasa telekomunikasi, dan sebagainya, akan mendapat bagian dari keuntungan.<sup>26</sup>

Bagian dari keuntungan ini juga sebagai kekayaan yayasan.

Melihat ketentuan Undang-Undang Yayasan yang mengatur tentang kekayaan yayasan, tampak bahwa undang-undang ternyata memperluas sumber perolehan kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan sumbernya tidak hanya terbatas kepada “modal” yang diberikan oleh pendiri yayasan dan sumbangan-sumbangan dari para dermawan, akan tetapi pihak lain terbuka untuk melakukan wakaf, hubah, dan hibah wasiat. Di samping itu terbuka pula bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha yang tujuannya dapat memperoleh keuntungan.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Notaris dan Akta Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Di dalam Pasal 1 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.<sup>28</sup>

## **2. Syarat Untuk Dapat Diangkat sebagai Notaris**

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan, bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

## **3. Kewenangan Notaris**

Wewenang Notaris sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 40.



- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

#### 4. Tugas-Tugas Notaris

Menurut GHS. Lumban Tobing, tugas-tugas dari Notaris yaitu :<sup>29</sup>

- a. Membuat akta-akta yang otentik.
- b. Melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmeden dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan (LN 1916-46 jo 43).
- c. Memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

#### 5. Kewajiban Notaris

Ada beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Notaris wajib membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

<sup>29</sup>GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 37.

- h. Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Notaris wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Notaris wajib mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Notaris wajib menerima magang Notaris.

## **6. Larangan Notaris**

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Dalam Pasal 17 UUJN dinyatakan bahwa notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pjabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.



## 7. Akta Notaris

### Pengertian dan Jenis-jenis Akta Notaris

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari:<sup>30</sup>

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada satu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>31</sup> Akta notaris merupakan alat bukti, yakni alat bukti berupa surat atau bukti tertulis. Surat sebagai bukti tertulis terbagi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lain yang bukan merupakan akta. Surat yang merupakan akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

#### a. Akta Otentik

Pasal 1868 KUH Perdata, memberikan definisi akta otentik, yaitu: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>31</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.116

yang mencatat apa yang diminta untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>32</sup>

Akta otentik membuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya, di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165 antara lain sebagai berikut: akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang mendapat hak dari padanya tentang yang dicantumkan di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir hanyalah sepanjang yang diberitahukan ini erat hubungannya dengan pihak dari pada akta. Pejabat dimaksud antara lain notaris, panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim, dan sebagainya.

Pasal 1870 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Hadirnya dua orang saksi merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dihindari notaris. Tidak hadirnya saksi, akta itu kehilangan sifatnya sebagai akta otentik dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata bahwa akta otentik menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu. Mengenai akta notaris maka ketentuan yang penting mengenai bentuk dari akta tersebut ditemukan dasar-dasarnya dalam Pasal 38 Ayat (1,2,3,4) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bentuk akta Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.119



1. Setiap akta notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I atau 16 Ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

b. Akta di Bawah Tangan

Pasal 1869 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila suatu akta dibuat oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak cakap, atau akta tidak dibuat sesuai dengan undang-undang, maka akta tersebut hanya dapat berlaku sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Bentuk pembuatan akta di bawah tangan tidak diperbuat di hadapan atau oleh pejabat umum. Akta di bawah tangan yang tidak bermaterai merupakan alat bukti yang sah yang harus bermaterai kemudian. Akta di bawah tangan harus ditandatangani. Yang menandatangani harus orang yang cakap untuk

melakukan perbuatan hukum. Tanda tangan tersebut disamakan dengan tanda tangan berupa cap jempol.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta yang meliputi:<sup>33</sup>

#### 1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah suatu akta Notaris bukan merupakan akta otentik, penilaian pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan.

#### 2. Kekuatan Pembuktian Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau

---

<sup>33</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2008, hlm. 26.



diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka para pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.

### 3. Kekuatan pembuktian material

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika ingin membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah *benar berkata* di hadapan Notaris menjadi *tidak benar berkata*, dan harus

dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pendirian Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang tentang Yayasan

###### 1. Persyaratan dalam Proses Pendirian Yayasan

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, persyaratan pendirian yayasan didasarkan pada persyaratan pendirian badan hukum pada umumnya. Pendirian badan hukum dapat dilakukan dengan berdasarkan tiga syarat yang berbeda, antara lain:<sup>34</sup>

###### a. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Syarat-syarat berdasarkan undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata dapat disimpulkan adanya 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Dinyatakan dengan tegas (*uitdrukkelijk*), bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum.
- 2) Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum.

###### b. Syarat berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi

Berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang ada, suatu badan dikatakan sebagai badan hukum, bilamana telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat materiil yang terdiri atas:

---

<sup>34</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23

- a) Harus ada suatu pemisahan kekayaan;
- b) Suatu tujuan;
- c) Suatu organisasi.

2) Syarat formal: dengan akta otentik.

c. Syarat berdasarkan pandangan doktrin

Syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan/ atau perkumpulan itu adalah badan hukum, di kalangan para ahli/ doktrin berpendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Meijers, suatu badan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:
  - a) Terdapat harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya;
  - b) Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum;
  - c) Kepentingan itu harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja tetapi untuk jangka waktu yang panjang;
  - d) Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan, tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terpisah dari kepentingan anggotanya.
- 2) Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan, status sebagai badan hukum dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu, yaitu:
  - a) Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud perhimpunan;



b) Kumpulan harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan-tujuan tertentu.

3) Menurut Ali Rido, untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, sesuatu perkumpulan/ perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a) Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b) Mempunyai tujuan tertentu
- c) Mempunyai kepentingan sendiri
- d) Adanya organisasi yang teratur

4) Menurut Soeroso, untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum, suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu:

- a) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
- b) Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

5) Menurut Rudhi Prasetya, atribut badan hukum hanya ada manakala undang-undang telah menentukannya demikian, dan undang-undang menentukan demikian manakala dipandang perlu. Untuk itu ada dua teknik yang dilakukan oleh perundang-undangan, antara lain:

- a) Secara tegas undang-undang menyatakan bahwa suatu badan adalah badan hukum.

- b) Dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh ketentuan undang-undang atas suatu badan.

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan, bahwa pada umumnya para ahli menekankan pada adanya pemisahan kekayaan dan tujuan tertentu. Namun, Soeroso tidak mencantumkan syarat adanya tujuan ini melainkan lebih menekankan pada pemisahan hak dan kewajiban para anggotanya.<sup>35</sup> Syarat formil yaitu, adanya akta tidak dipersyaratkan oleh para ahli. Meijers menempatkan badan hukum tidak terjadi dengan persetujuan, tetapi terjadi karena perbuatan hukum.<sup>36</sup> Scholten mendukung pendapat Meijers dengan mengatakan bahwa perbuatan pendirian badan hukum itu bukan dengan persetujuan yang menciptakan suatu perikatan di antara para pendiri. Pada pendirian badan hukum sama sekali tidak ada yang menawarkan atau menerima tawaran.<sup>37</sup>

Dari semua syarat yang dipaparkan di atas, baik syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai badan hukum, antara lain:<sup>38</sup>

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> *Ibid*. hlm. 29.



Yayasan dalam proses pendiriannya menggunakan persyaratan yang berdasarkan hukum kebiasaan. Di Indonesia, berlaku Pasal 365 KUH Perdata yang mengakui yayasan sebagai badan hukum. Yayasan dalam proses pendiriannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>39</sup>

1. Syarat materiil yang terdiri dari:
  - a. Harus ada suatu pemisahan harta kekayaan,
  - b. Adanya suatu tujuan, dan
  - c. Mempunyai organisasi;
2. Syarat formil, yaitu harus dengan akta otentik.

Dengan ketiadaan aturan yang mengikat, mengakibatkan terjadinya ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum di dalam proses pendirian yayasan. Ada yang setelah memiliki akta notaris dianggapnya sudah cukup disebut sebagai badan hukum. Ada pula yang melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri, bahkan ada yang mengumumkan dalam Berita Negara.<sup>40</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa: “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”. Syarat ini memperlihatkan bahwa setiap orang dapat mendirikan yayasan, baik secara

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 34.

<sup>40</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 4.

sendiri atau bersama. Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perorangan maupun badan hukum.

2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya

Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Dengan pemisahan kekayaan, maka hubungan antara pendiri dengan kekayaannya terputus. Dalam Undang-Undang Yayasan ini telah disyaratkan adanya batas minimum kekayaan yang harus dipisahkan untuk mendirikan yayasan. Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan ditetapkan besarnya kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri jika pendirinya adalah orang perorangan atau Badan Indonesia adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jika yayasan didirikan oleh orang asing atau badan hukum asing besar kekayaan awal yang dipisahkan adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia

Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa: “Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Akta otentik merupakan syarat formal pendirian yayasan. Tanpa



adanya akta notaris, maka pendirian yayasan tidak akan pernah ada. Akta pendirian yayasan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Yayasan terdiri atas anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan tempat kedudukan;
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut;
- 3) Jangka waktu pendirian;
- 4) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- 5) Cara memperoleh dan menggunakan kekayaan;
- 6) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- 7) Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- 8) Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- 9) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- 10) Penggabungan dan pembubaran yayasan;
- 11) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi, atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

4. Harus memperoleh pengesahan menteri

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan dinyatakan, bahwa: “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri”. Segala perbuatan hukum yang dilakukan pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan, bahwa: “Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”.

Pengumuman yayasan merupakan kewajiban Menteri Hukum dan HAM yang harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan.

6. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan dan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penegasan identitas bagi yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan nama dengan yayasan lain.

## **2. Proses Pendirian Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan**

### **a. Proses Pendirian Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan**

Sebelum berlaku Undang-Undang Yayasan, yayasan telah diatur dalam Pasal 365, 899, 900, dan 1680 KUH Perdata. Walaupun yayasan telah diatur dalam beberapa ketentuan tersebut, namun belum ada satu pun dari ketentuan-ketentuan tersebut yang memberikan rumusan mengenai definisi yayasan, status hukum yayasan, serta cara mendirikan yayasan. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang ada dalam praktik. Meskipun begitu, yayasan telah dianggap berstatus badan hukum.



Untuk mendirikan yayasan berdasarkan hukum kebiasaan tahapan yang harus dilalui yaitu:

- 1) Pembuatan akta pendirian yayasan yang otentik oleh notaris,
- 2) Mendaftarkan yayasan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau
- 3) Mendaftarkan yayasan di pengadilan negeri lalu mendapat izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, atau
- 4) Tidak melakukan pendaftaran yayasan sama sekali.

Pendirian yayasan berdasarkan hukum kebiasaan dilakukan dengan adanya pemisahan kekayaan, tujuan, organisasi, serta dengan akta otentik. Di dalam akta notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan adanya pengesahan dari Menteri Kehakiman. Namun, tidak sedikit pengurus yayasan yang melakukan pendaftaran. Ada yang melakukan pendaftaran di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau mendaftarkan yayasan di pengadilan negeri lalu mendapat izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Persyaratan dan proses pendirian yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, dapat digambarkan bahwa terdapat kekurangan di dalamnya, antara lain yaitu: landasan hukumnya tidak begitu jelas karena belum ada aturannya secara tertulis sehingga mengakibatkan tidak adanya keseragaman hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah yayasan dalam

menjalankan kegiatannya. Timbul keraguan mengenai status badan hukum yayasan menurut pandangan masyarakat yang berbeda-beda mengenai prosedur dan persyaratan pendirian yayasan, sehingga kepastian hukum dan ketertiban hukum tidak dapat terwujud dalam hal ini.

**b. Proses Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**

Pendirian yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

1) Pembuatan akta pendirian yayasan yang otentik oleh notaris

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam mendirikan yayasan adalah pembuatan sekaligus penandatanganan akta di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa: "Pendiri yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia". Dalam pembuatan akta ini pendiri dapat diwakili orang lain dengan surat kuasa. Muatan akta adalah anggaran dasar yayasan. Yayasan dianggap telah berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh pendiri di hadapan notaris. Akta pendirian ini merupakan dasar bagi yayasan dalam mengelola yayasannya, karena di dalamnya memuat anggaran dasar yayasan yang wajib dijunjung tinggi oleh organ yayasan sebagai aturan main dalam pengelolaan yayasan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Adib Bahari, *Op.cit.*, hlm. 35.



## 2) Permohonan pengesahan akta pendirian

Setelah akta dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris, tahapan berikutnya adalah mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengajuan permohonan ini dilakukan oleh pendiri atau orang yang diberi kuasa secara tertulis.

## 3) Pengesahan akta pendirian

Pengesahan akta pendirian ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat. Pengesahan ini dimaksudkan agar yayasan memperoleh status badan hukum. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dinyatakan bahwa, pengesahan diberikan paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima. Apabila permohonan ditolak, menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

## 4) Pengumuman yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Setelah akta pendiriannya disahkan, yayasan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini dilakukan setelah Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia

menerima permohonan dari pengurus yayasan atau yang dikuasakan. Pengajuan permohonan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akta pendirian yayasan disahkan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Peralihan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa klasifikasi yayasan yang berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku, antara lain:

- a) Yayasan yang terdaftar pada pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- b) Yayasan yang terdaftar pada pengadilan negeri dan mempunyai izin untuk melakukan kegiatan.

Kedua jenis yayasan tersebut mendapat status badan hukum asalkan menjalankan ketentuan yang berkaitan dengan peralihan status yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan, yaitu dengan menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan juga menyatakan bahwa yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Penyesuaian anggaran dasar tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang Yayasan berlaku. Setelah penyesuaian tersebut



dilakukan, yayasan bersangkutan harus melaporkannya kepada Menteri dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian anggaran dasar. Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa, “Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak lain yang berkepentingan”.

**c. Proses Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**

Proses Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, antara lain:

- 1) Pembuatan akta pendirian yayasan yang otentik oleh notaris
- 2) Permohonan pengesahan akta pendirian diajukan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta tersebut
- 3) Pengesahan akta pendirian ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- 4) Pengumuman yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri

Perubahan proses pendirian yayasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu terdapat dalam hal prosedur mendapatkan status badan hukum.

Sebagaimana dalam pendirian yayasan maka dalam permohonan pengesahan sebagai badan hukum yayasan, juga ada persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratan-persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Salinan akta pendirian yayasan bermaterai sebanyak dua eksemplar;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yayasan yang dilegalisasi notaris;
- d. Surat keterangan domisili yayasan disertai alamat lengkap yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi notaries;
- e. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;
- f. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan tersebut;
- g. Asli Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atas nama yayasan untuk biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dikirimkan lewat pos ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) oleh notaris yang sama, yang dulunya membuat akta pendirian yayasan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian diajukan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta tersebut, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akta tersebut ditandatangani.



Kemudian, ketentuan mengenai batasan waktu menteri meminta pertimbangan dari instansi terkait dan batasan waktu instansi terkait memberikan jawaban tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lain halnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan bahwa Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan instansi terkait wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

Perubahan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa kewenangan menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM atas nama menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Ketentuan tersebut diubah sehingga kewenangan dalam memberikan pengesahan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

## **B. Peranan Notaris dalam Pendirian Yayasan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Yayasan Berlaku**

Definisi peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu peranan adalah aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan hal tersebut pendirian yayasan juga memerlukan peranan notaris.

Dalam proses pembuatan akta, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Kewenangan notaris dalam proses pendirian yayasan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dengan demikian, notaris dalam proses pembuatan akta, juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum yang antara lain mengenai



ketentuan hukum yang mengatur tentang yayasan, tata cara pendirian yayasan, serta persyaratan dalam pendirian yayasan.

Dalam menjalankan peranannya dalam pendirian yayasan, notaris juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai notaris yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan akta di hadapan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

## **1. Peranan Notaris dalam Pendirian Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan**

Proses pendirian yayasan sebelum berlaku Undang-Undang Yayasan dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan. Berdasarkan hukum kebiasaan, yayasan dapat didirikan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Dibuatnya akta pendirian yayasan yang otentik oleh notaris, didaftarkan ke pengadilan negeri, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau
- b. Dibuatnya akta pendirian yayasan yang otentik oleh notaris, didaftarkan ke pengadilan negeri, kemudian mendapat izin dari instansi terkait.

Persyaratan dalam proses pendirian yayasan, antara lain: yayasan harus ada pemisahan kekayaan, tujuan, organisasi, dan adanya akta pendirian yayasan yang otentik yang dibuat oleh notaris. Suatu yayasan baru dapat dikatakan telah berdiri apabila telah memiliki akta otentik. Akta otentik merupakan akta notaris, karena dari segi pembuatannya dilakukan oleh notaris atau di hadapan notaris, dan akta tersebut dibuat dalam bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian notaris memiliki peranan dalam pendirian yayasan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.

## **2. Peranan Notaris dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**

Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan didirikan dengan persyaratan, antara lain: didirikan oleh satu orang atau lebih, ada pemisahan harta kekayaan pendiri, dibuat akta pendiriannya oleh



notaris, harus memperoleh pengesahan dari menteri, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan dan tidak boleh memakai nama yayasan yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Permohonan pengesahan akta pendirian diajukan secara tertulis kepada menteri oleh pendiri atau kuasanya. Kemudian, pengumuman yayasan dilakukan oleh pengurus yayasan. Notaris hanya berperan dalam pembuatan akta pendirian yayasan yang otentik. Notaris dalam undang-undang ini juga belum diwajibkan untuk mengurus pengesahan akta pendirian yayasan.

### **3. Peranan Notaris dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan dalam perubahan Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa, untuk memperoleh pengesahan akta pendirian yayasan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Dengan ketentuan tersebut, peranan notaris dalam

pendirian yayasan menjadi bertambah yaitu di samping notaris membuat akta pendirian yayasan, notaris juga mengurus pengesahan akta pendirian tersebut kepada menteri. Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Yayasan juga menyebutkan, bahwa notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Dengan ditetapkan dalam undang-undang, seorang notaris menjadi terikat untuk menjalankan tugas mengurus permohonan pengesahan akta pendirian yayasan. Ini merupakan pekerjaan baru notaris, yang merupakan pekerjaan tambahan. Untuk urusan yayasan, notaris tidak hanya membuat akta pendirian yayasan, tetapi juga mengurus permohonan pengesahannya kepada menteri.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persamaan proses pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Yayasan yaitu yayasan sama-sama didirikan dengan akta pendirian yayasan yang otentik oleh notaris.

Perbedaan proses pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang Yayasan, yaitu terbagi menjadi sebagai berikut:

- a) Perbedaan proses pendirian yayasan berdasarkan hukum kebiasaan dengan proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, yaitu pada hukum kebiasaan tidak jelas tahapan pendiriannya, tidak ada keseragaman hukum yang dijadikan pedoman dalam pendirian yayasan, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk melakukan pendaftaran ke salah satu instansi pemerintah sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yayasan yang telah berdiri, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan dalam berita negara sehingga masyarakat tidak mengetahui secara resmi tentang adanya yayasan, status hukum yayasan tidak jelas karena tidak adanya aturan tertulis tentang yayasan yang mengatakan bahwa yayasan itu adalah badan hukum.
- b) Perbedaan proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan proses pendirian yayasan

berdasarkan hukum kebiasaan, yaitu dalam proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, untuk memperoleh status badan hukum yayasan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yayasan juga wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dalam proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan masih belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat dan lambatnya pembentukan Undang-Undang Yayasan berakibat lamanya masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut terutama bagi yayasan yang telah berdiri sebelumnya.

- c) Perbedaan proses pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan, yaitu permohonan pengesahan akta pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diajukan oleh pendiri atau kuasanya dan pengesahan akta pendirian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM setempat atas nama menteri. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan, permohonan pengesahan akta pendiriannya diajukan melalui notaris yang membuat akta tersebut dan pengesahan akta pendirian dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM.



2. Peranan notaris dalam pendirian yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan yaitu membuat akta pendirian yayasan yang otentik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Yayasan, peranan notaris bertambah, notaris berperan juga dalam mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM. Ikut sertanya peranan notaris dalam pendirian yayasan bertujuan agar pelaksanaan pendirian yayasan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang akan dikemukakan penulis hendaknya berguna sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan dalam menunjang peran notaris dalam pendirian yayasan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mengupayakan agar sistem pengesahan yayasan pada saat sekarang ini menggunakan sistem yang sudah diterapkan pada sistem pengesahan Perseroan Terbatas, yaitu dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum. Dengan begitu, diharapkan agar sistem pengesahan dapat lebih mempersingkat waktu dan memudahkan para pendiri dalam proses pendirian yayasan.
2. Sosialisasi aturan hukum yang menyangkut yayasan sebaiknya lebih diterapkan kepada semua lapisan masyarakat di berbagai daerah dengan memberikan penyuluhan hukum, agar dapat tercipta ketertiban hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2010.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cet. II., Alumni, Bandung, 1991.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Gunawan Widjaja, *Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- H. Budi Untung, dkk., *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bhakti, 1995.



Victor M. Situmorang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, 1993.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.



## AKTA PENDIRIAN

""YAYASAN

""

Nomor :





3.

-Para penghadap Saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini :----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah **Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)** yang dipisahkan dari kekayaan pribadi untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan-----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan **Anggaran Dasar**, sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- **"YAYASAN** " -----

-(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan **Yayasan**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Padang pada Jalan

Taratak Paneh, nomor : 7., Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji.-----

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

### ----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

#### ----- **Pasal 2** -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang ;-----  
Keagamaan, Sosial, dan Kemanusiaan.-----

### ----- **KEGIATAN** -----

#### ----- **Pasal 3** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Menyelenggarakan pendidikan non formal agama dan dakwah.-----
2. Menyelenggarakan/mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah, dan karya-karya agama.-----
3. Mendirikan sarana Ibadah, Pondok Pesantren dan Panti Asuhan, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, dan melakukan studi banding keagamaan.-----
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kognitif, dalam rangka pengembangan pendidikan non formal, iptek, kepribadian, seni, adat dan budaya serta olah raga.-----



5. Menyelenggarakan dan mendirikan lembaga pendidikan non formal, kursus-kursus, pelatihan keterampilan dan penyuluhan-penyuluhan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum.-----
6. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan panti werda.-----
7. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan. -----
8. Menyelenggarakan Konsultasi, Bimbingan, Pelatihan, dan Pelayanan sejenisnya dalam bidang keagamaan tanpa dipungut biaya;-----
9. Menyelenggarakan penerbitan Jurnal, Majalah dan jenis penerbitan lainnya dalam bidang keagamaan yang tidak diperjual belikan;-----

#### ----- JANGKA WAKTU -----

#### ----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. --

#### ----- KEKAYAAN -----

#### ----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar **Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)**.-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----
  - b. Wakaf ;-----
  - c. Hibah ;-----
  - d. Hibah Wasiat ; dan, -----

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

### ORGAN YAYASAN

#### Pasal 6

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
- b. Pengurus ;-----
- c. Pengawas ;-----

#### PEMBINA

#### Pasal 7

1. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas ;-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memncapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya



kekosongan tersebut wajib diangkat Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri - dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

#### **Pasal 8**

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
  - a. Meninggal dunia ;-----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina ;-----
  - e. Dinyatakan pailit atau diatur dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ;-----
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

#### **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**

#### **Pasal 9**

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi ;-----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau ----- anggota Pengawas ;-----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;-----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-anggaran tahunan Yayasan ;-----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;-----
  - f. Pengesahan Laporan Tahunan ;-----
  - g. Penunjukkan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

#### **RAPAT PEMBINA**

#### **Pasal 10**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----  
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu - bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.-----



2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam Wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat. -
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa. -----

#### ----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ;-----
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota -----  
Pembina ;-----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;-----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;-----

e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Pembina ;-----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah ;-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ;-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----- kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;-----



- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ;-----
6. Setiap Rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat ;-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris ;-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut ;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina ;-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat ;-----

#### **RAPAT TAHUNAN**

#### **Pasal 12**

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :-----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;-----
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;-----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

#### ----- **PENGURUS** -----

#### ----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
  - a. Seorang Ketua ;-----
  - b. Seorang Sekretaris ; dan, -----
  - c. Seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum ;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum ;-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum ;-----

#### ----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat, atau Negara



berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ;-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----
  - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan, -----
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :-----

1. Meninggal dunia ;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pembina wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;-----



- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di Luar Negeri ;-----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;-----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;-----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;-----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b,c, d, e, dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;-----
  - 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;-----
  - 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hugungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan ;-----

----- **Pasal 18** -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ;-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya ;-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya ;-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya ;-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina ;-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

#### ----- PELAKSANA KEGIATAN -----

#### ----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana ----- Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak



pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Putusan berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang ----- bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ---

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat Rapat, dan acara Rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Pengurus ;-----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;-



c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ;-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Pengurus ;-----

### **Pasal 23**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus ;-----

#### ----- **PENGAWAS** -----

#### ----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

#### ----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat, atau Negara



- berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka  
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ;-----
  3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling  
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus  
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut.-----
  4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu  
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,  
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas  
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
  5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada  
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya.-----
  6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka  
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal  
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman  
Dan Hak Azasi Manusia Republik - Indonesia dan Instansi terkait.-----
  7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau  
Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 26** -----

- Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila :-----
1. Meninggal dunia ;-----
  2. Mengundurkan diri ;-----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling lambat 5 (lima) tahun ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

### **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

#### **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;-----
  - b. Memeriksa dokumen ;-----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, ----- atau ;-----
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;----
  - e. Memberi segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.-----
4. Pengawas berhak memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----



6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau, -----
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

#### ----- **RAPAT PENGAWAS** -----

#### ----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

#### **Pasal 29**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----

a. Dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengawas;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas ----- kedua ;-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----



- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ;-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah pengawas.-----

**Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

#### **RAPAT GABUNGAN**

##### **Pasal 31**

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----



8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-

#### **Pasal 32**

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

#### **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**

#### **Pasal 33**

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----



6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

#### ----- TAHUN BUKU -----

##### ----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2010 (dua ribu sepuluh).-----

#### ----- LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-sekurang :-----
  - a. Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;-----

b. Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Aktivitas, Laporan arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan.-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani Laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.-----

7. Bagi Yayasan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan Luar Negeri atau pihak lain sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** atau lebih, atau yang mempunyai kekayaan diluar wakaf sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)** atau lebih, Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.-----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.-----



4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

#### **Pasal 37**

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

#### **PENGGAJABUNGAN**

#### **Pasal 38**

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau,-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

#### **Pasal 39**

-Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

1. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

2. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan.-----

3. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----

4. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.--



5. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

6. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak azasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

#### PEMBUBARAN

##### Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
- c. Putusan pengadilan yang telah berkeaan dengan hukum tetap berdasarkan alasan :

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau,

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ;

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.---

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----



8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubar nya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

### **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**

#### **Pasal 42**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

### **PERATURAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

a. **PEMBINA** ;-----

-

b. **PENGURUS** :-----

- **Ketua** :-----

- **Sekretaris** :-----

- **Bendahara** :-----



c. **PENGAWAS** :-----



## UNIVERSITAS ANDALAS

-Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat - kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

### ----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Padang pada hari dan tanggal seperti yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Non  
**NURMADINO ANHAR, Sarjana Hukum**, lahir di Padang tanggal 05 (lima

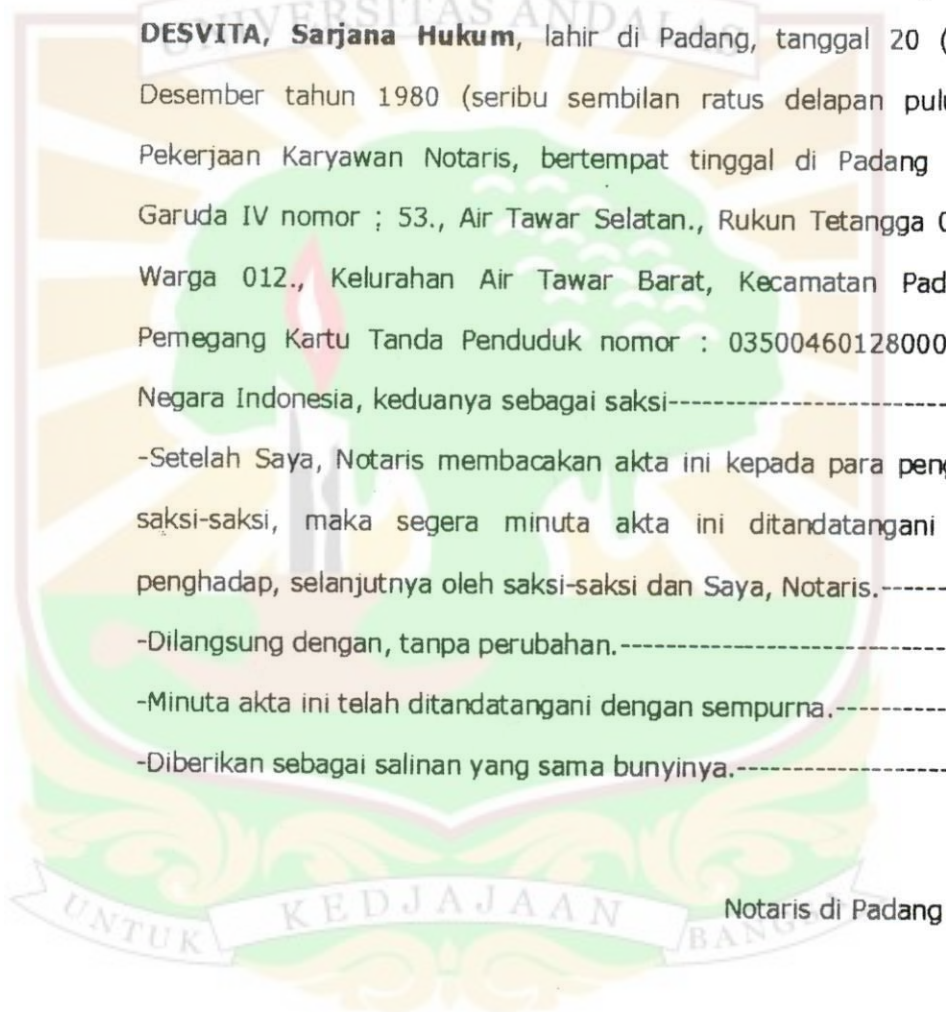
April tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Padang pada Jalan Pulau Aie nomor : 16., Rukun Tetangga 02., Rukun Warga 01., Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1371064504850001., Warga Negara Indonesia, dan Nyonya **YOSI DESVITA, Sarjana Hukum**, lahir di Padang, tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Status Pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Padang pada Jalan Garuda IV nomor : 53., Air Tawar Selatan., Rukun Tetangga 002., Rukun Warga 012., Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 0350046012800001., Warga Negara Indonesia, keduanya sebagai saksi-----

-Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh para penghadap, selanjutnya oleh saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

-Dilangsung dengan, tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Padang



## RIWAYAT HIDUP



Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1989, Rafni merupakan putri bungsu dari pasangan Mochamad Fauzi dan Novizar. Penulis menempuh pendidikan dasar sejak tahun 1995 di SD Negeri 02 Duren Sawit Jakarta hingga tahun 2001. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 27 Jakarta dan selesai pada tahun 2004. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 21 Jakarta dan selesai pada tahun 2007.

Sejak tahun 2007 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan pada tanggal 11 Januari 2012 penulis mempertahankan skripsinya dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Notaris dalam Pendirian Yayasan” di bawah bimbingan Ibu Damas Reny Priharti, S.H., M.H. dan Ibu Neneng Oktarina, S.H., M.H.

